

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab 1 sampai bab 4 bahwa Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa kesimpulan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki prosedur administrasi yang baik, dimana kegiatan perjalanan dinas ini memiliki langkah-langkah dalam mengajukan kegiatan hingga memberikan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan perjalanan dinas dengan sangat terperinci.
2. Dokumen yang digunakan atau dibutuhkan dalam kegiatan perjalanan dinas sudah tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban bahwa kegiatan perjalanan dinas sudah sesuai dengan anggaran yang diberikan.
3. Ketentuan biaya perjalanan dinas pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perjalanan Dinas Menteri Keuangan.
4. Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang penting pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena segala kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berhubungan langsung dengan kegiatan diluar kantor, sehingga mengharuskan anggota atau staf Bawaslu melakukan perjalanan dinas.

Penulis juga mendapatkan banyak ilmu tentang adanya perjalanan dinas pada lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemilu tahun 2024. Segala kegiatan yang dikerjakan penulis di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merupakan pekerjaan yang belum pernah dilakukan di universitas. Mulai dari awal pengajuan perjalanan dinas hingga membuat laporan

pertanggungjawaban perjalanan dinas itu sendiri. Maka dari itu penulis memiliki pengalaman yang bermanfaat dimana nantinya bisa diterapkan di kehidupan dunia kerja, terutama di lembaga pemerintahan.

V.2 Saran

Saran penulis dalam prosedur administrasi perjalanan dinas pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban atau SPJ yang dimana harus diberikan kepada pihak staf PPK paling lambat 2 hari setelah kegiatan perjalanan dinas itu dilaksanakan. Dan ketika menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau SPJ, maka anggota atau staf Bawaslu yang melakukan kegiatan perjalanan dinas tersebut harus memberikan dokumen yang dibutuhkan secara tepat sehingga SPJ akan selalu di verifikasi dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu diperlukan perhatian pada pelaporan pertanggungjawaban, baik itu ketepatan dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau pun ketepatan dalam mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam laporan pertanggungjawaban.